

**REKONSTRUKSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA MENUJU
PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S2
Program Studi Magister Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**ADRENAL STEZEN
NIM 201420380211037**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERISITAS MUHAMMAIYAH MALANG
Agustus 2018**

REKONSTRUKSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

ADRENAL STEZEN
NIM 201420380211037

Telah disetujui

Pada Hari/Tanggal, Rabu, 13 Agustus 2018

Pembimbing Utama



Dr. Sulardi, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping



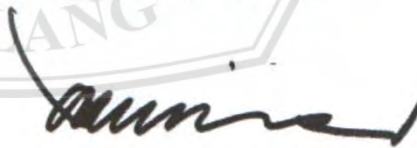
Dr. Sirajuddin, MH.

Direktor
Pascasarjana



Am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Mokh Najih, Ph.D

TESIS

ADRENAL STEZEN

NIM 201420380211037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada hari/tanggal , Rabu/15 Agustus 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
Memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

Ketua/Penguji : Dr. Sulardi, SH., M.Si
Sekretaris/Penguji : Dr. Sirajuddin, MH.
Penguji : Dr. Haris Tofly, SH., M.Hum
Penguji : Dr. Tongat, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADRENAL STEZEN
NIM : 201420380211037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul : **REKONSTRUKSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS.**
Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Agustus 2018
Yang Menyatakan,



AL STEZEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “**Rekontruksi Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia Menuju Pemerintahan Yang Demokratis**” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah kegelapan zaman menuju cahaya kebenaran yang menjunjung nilai-nilai harkat dan martabat menuju insan berperadapan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* kepada:

1. Drs. H. Fauzan, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Ahsanul In'am, MM Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Mokh. Najih, Ph.D atas motivasi, bimbingan dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Bapak Dr. Sulardi, SH., M.Si, sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Sirajuddin, SH., MH, sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Semua Dosen dan staf Tata usaha Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan keilmuan serta pelayanan selama menyelesaikan program studi.
7. Kedua orang tua, ayahanda Rohidi, Ibunda Siti Aisyah, kakanda Prayudi Rahmatullah, M.HI ayunda tercinta Wenny Damayanti, S.Pd yang senantiasa memotivasi dan memberikan dukungan moril maupun materil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister ini.
8. Kakanda Nurdin Soleh, SH., M.Hum dan Drs. Cholidah yang selalu memotifasi, menasehati serta mengarahkan penulis untuk merampungkan studi di kampus

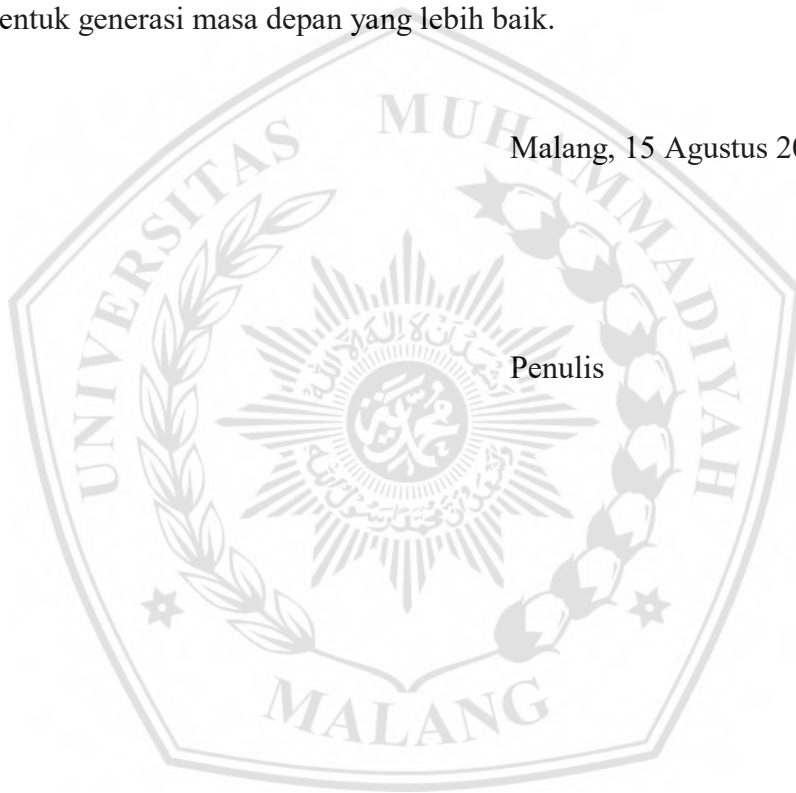
9. tercinta ini. Teman-Teman dan pihak-pihak lain yang turut serta dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terimakasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'a yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap saran dan kritik konstruktif dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, dan kepada lembaga pendidikan guna untuk membentuk generasi masa depan yang lebih baik.

Malang, 15 Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak.....	viii
Latar Belakang.....	1
Konsep Rekonstruksi.....	5
Konsep Demokrasi	6
Konsep Sistem pemerintahan	8
Konsep Pemilihan Umum.....	10
Metodelogi Penelitian.....	12
Jenis, Pendekatan, dan Tipologi Penelitian	13
Sumber Bahan Hukum.....	13
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
Analisis Bahan Hukum	14
Hasil Penelitian Dan Pembahasan	15
Konstruksi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia	15
Pemilihan Presiden Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Orde Lama).....	16
Pemilihan Presiden Di Indonesia Era Orde Baru	17
Sistem Pemilihan Presiden Pada Era Reformasi	18
Rekonstruksi Sistem Pemilihan Menuju Pemerintahan Yang Demokratis	19
Rekonstuksi Persyaratan Calon Presiden dan wakil Presiden	20
Rekonsturksi Proses Pencalonan	21
Rekonstruksi Mekanisme Pemilihan	25
Kesimpulan	28

ABSTRAK

Adrenal Stezen, 2018. 201420380211037, (The Reconstruction Of President Selection System In Indonesia Toward Democratic Government). Thesis, Legal Studies Program. Post Graduate Program, University of Muhammadiyah Malang, Supervisor: (I) Dr. Sulardi, SH, M.Si. (II) Dr. Sirojuddin, SH, MH

Keyword: Presidential Election, Government, Democracy

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang sering di identikkan sebagai suatu ajang pesta demokrasi. Dan usaha untuk mewujudkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas, demokratis, jujur dan adil yang mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi dan golongan, tidak cukup hanya dengan peningkatan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta meningkatkan profesionalitas dan kualitas dari penyelenggara pemilu, tetapi harus juga memperbaiki sistem pemilu itu sendiri, sehingga betul-betul dapat memberikan kesempatan pada warga masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya dengan langsung umum, bebas dan rahasia, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal reaserch*) dengan Pendekatan yang digunakan yakni penelitian kualitatif (*kualitatif research*), yakni penelitian ini diarahkan kepada eksplorasi kajian pustaka (*library research*) yang bersifat *statement* atau pernyataan, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya penelitian dengan menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori - teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Penyempurnaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tidak hanya terkait penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legeslatif dan pemilu presiden, melainkan juga penataan kembali format pemilihan presiden itu sendiri. yang secara substansial harus mengatur tentang sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*. Dan secara sifatnya, sistem pemilihan presiden harus memiliki makna Istilah bermakna merujuk pada 3 kriteria, yaitu *Pertama*, keterbukaan, Keterbukaan disini mengandung maksud bahwa akses pada pemilihan presiden harus terbuka dan bebas bagi setiap warga Negara atau hak pilih universal, bahwa ada pilihan dari antara alternatif-alternatif politik riil. *Kedua*, Ketepatan, Kriteria ini bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye dan prosedur pemilu dalam pengertian lebih ketat yaitu semua calon harus memiliki akses yang sama kepada media Negara dan swasta berdasarkan standar standar hukum yang sama. *Ketiga*, keefektifan, pemilihan presiden yang efektif dapat ditandai dengan pengawasan keamanan, dengan menganalisis atas interaksi antara sistem pelaksanaan demokrasi dan kehidupan demokrasi.

Kata Kunci: Sistem Pemilihan, Pmerintahan, Demokrasi

ABSTRACT

Adrenal Stezen: The Reconstruction Of President Selection System In Indonesia Toward Democratic Government). Thesis, Legal Studies Program. Post Graduate Program, University of Muhammadiyah Malang, Supervisor: (I) Dr. Sulardi, SH, M.Si. (II) Dr. Sirojuddin, SH, MH

Elections are an activity that is often identified as a venue for democratic parties. And the effort to realize the election of a qualified, democratic, honest and fair presidential and vice president who prioritizes the interests of the people rather than personal and group interests is not enough simply by improving the function of planning, implementing, monitoring and evaluating and improving the professionalism and quality of election administrations, but must also improve the electoral system itself, thereby providing an opportunity for citizens to exercise their right to vote directly, publicly and freely, without any intervention from any party.

The method used in this research is normative juridical. Normative research method is also referred to as doctrinal research with the approach used qualitative research (research qualitative), ie this research is directed to the exploration of library research which is a statement or statement, so that this research is analytical descriptive. Descriptive means research by describing a rule of law in the context of legal theories and its implementation, and analyzing the facts carefully about the system of presidential and vice presidential elections in Indonesia.

Completion of the presidential and vice presidential election system is not only related to the simultaneous implementation of legislative elections and presidential elections, but also the reorganization of the presidential election format itself. which should substantially govern the electoral law, electoral process, and law enforcement systems. And by its very nature, the presidential election system must have meaning. The term meaningful refers to 3 criteria, namely First, openness, Openness here implies that access to the presidential election should be open and free for every citizen or universal suffrage, that there is a choice from among alternatives real-political alternatives. Second, Accuracy, This criterion aims at the registration and identification of voters, campaigns and electoral procedures in a stricter sense that all candidates must have equal access to State and private media based on the same standard of law standards. Third, effectiveness, effective presidential elections can be characterized by security oversight, by analyzing the interactions between democratic systems of conduct and democratic life.

Keyword: Presidential Election, Govenment, Democracy

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah lintasan sejarah besar bangsa ini yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sangat banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa dipetik, hingga usianya kini Indonesia sudah melewati berbagai dinamika dalam suksesi penyelenggaraan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pengalaman-pengalam ini nantinya akan menjadi bahan pelajaran di masa mendatang dan tentunya perlu sebuah medium yang merekam, menganalisis, dan mengurai data dan fakta setiap tahapan dan peristiwa Pemilu.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang sering di identikkan sebagai suatu ajang pesta demokrasi. Dikatakan demikian karena dalam pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin suatu negara. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu usaha dalam mewujudkan negara yang demokratis harus dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah Negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.¹

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi pemilihan yang berkredibilitas tentu harus dilaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 22E ayat 1) hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Tujuan pemilu menurut ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun sayangnya ketika runtuhnya Orde Baru 21 Mei 1998, banyak kejadian tentang berbagai perubahan politik yang fundamental dalam proses demokratisasi, namun situasi politik yang terjadi sepanjang rezimnya belum menyentuh perubahan yang fundamental dari nilai demokrasi itu sendiri, sehingga jalan panjang transisi

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

demokrasi masih abortif. Perubahan-perubahan hanya bergerak pada tataran prosedural dan legal formal, dan tidak menyentuh pada perubahan mental, budaya, sikap dan perilaku para elit politik dan masyarakat, sehingga berimplikasi pada berbagai pelanggaran dan penyimpangan dari nilai demokrasi itu sendiri

Dalam hal penentuan calon presiden dan wakil presiden juga sangat bergantung terhadap partai atau gabungan partai politik yang mengusungnya, keterlibatan partai politik sebagai institusi yang mewakili ideologi, kepentingan dan keragaman masyarakat. Partai politik ditempatkan sebagai wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat modern yang plural. Di tengah membludaknya jumlah warga Negara Indonesia, menjadi hal yang tidak memungkinkan untuk melibatkan setiap warga negara secara langsung dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena sistem perwakilan menjadi pilihan, dan partai politik memegang peran sebagai media aspirasi yang efektif dalam menjembatani kepentingan rakyat.²

Dalam pelaksanaan pemilihan Presiden Republik Indonesia telah mengalami periodisasi yang sangat signifikan, dimana sistem pemilihan pun terus menerus mengalami pembaharuan seiring komitmen bangsa ini menjadi Negara yang demokratis. Misalnya pada awal terjadi ketika Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia terpilih melalui mekanisme musyawarah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Hari pertama setelah memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang di Jakarta untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam persidangan tersebut berlangsung relatif singkat, sebuah naskah yang terkenal dengan sebutan UUD 1945 disahkan dan menjadi kitab suci negara Indonesia. Sejak saat itulah Republik Indonesia mempunyai Presiden pertama yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia kedepannya. yang memimpin kekuasaan eksekutif tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan.

Pasca PPKI memilih Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno menjabat Presiden hingga terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal

² Firman Subagyo; *Menata Partai Politik, Dalam Arus Demokratisasi Di Indonesia*; (RMBOOKS; Jakarta; 2009) Hlm. 77

27 Desember 1949. Tapi nyatanya hanya menjadi angan-angan saja bahkan kondisi perpolitikan setelah Proklamasi Kemerdekaan tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pemilihan umum.

Pada masa Republik kedua. Konstitusi yang diterapkan oleh Indonesia adalah konstitusi RIS 1949 Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50-3, dimana penyelenggaraan pemilihan Presiden pada masa ini berpedoman pada Pasal 69 ayat (1 dan 2) Konstitusi RIS yang berbunyi “Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2. Beitupun dengan proses pemilihan wakil Presiden, Mohammad Hatta dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.³

Pada tanggal 22 Februari 1967 pemerintahan Soekarno mengalami situasi perpolitikan yang semakin runyam, hal ini ditandai dengan penyerahan Jabatan Kepresidenan oleh Presiden Soekarno kepada pengemban Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, yaitu Jendral Soeharto, sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman Presiden/Mandataris/Panglima Tertinggi ABRI tanggal 10 Februari 1967. Adapun yang menjadi dasar hukum dari penyerahan kekuasaan tersebut adalah TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah Sebelas Maret memegang jabatan Presiden.

Dari ketetapan MPRS MPRS No. XXXIII/MPRS/1967⁴, secara resmi kekuasaan Presiden Soekarno berakhir dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden kedua, yang pada tanggal 12 Maret 1967 disumpah dan dilantik dalam rangkaian Sidang Istimewa MPRS. Ini lah peralihan kekuasaan Presiden pertama dalam rangkaian Sidang Istimewa MPRS dan dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia. kemudian berdasarkan TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968 Jendral Soeharto diangkat sebagai Presiden secara muthlak Jendral Soeharto mengakhiri masa peralihannya setelah MPR hasil Pemilu 1971 melakukan pemilihan Presiden pada bulan Maret.

Pada bulan Maret 1973 MPR hasil Pemilu yang pertama, mengadakan Sidang Umum. Di dalam kesempatan tersebut melalui TAP MPR No. IX/MPR/1973, MPR

³ Yusril Ihza Mahendra, (*Dinamika Tatanegara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996), hlm. 62

⁴ Harun Alrasyid, (*Tradisi Calon Tunggal dalam Pemilihan Presiden*”, Suara Pembaharuan, 2 Maret 1993), hlm. 76

mengangkat Presiden Soeharto sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Pada kesempatan itu untuk pertama kalinya penyelenggaraan tata cara pemilihan Presiden yang didasarkan pada UUD 1945, mekanismenya diatur melalui Ketetapan MPR, yaitu TAP MPR No. II/MPR/1973, MPR mengangkat Presiden Soeharto sebagai Presiden untuk kedua kalinya. dalam ketetapan tersebut proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah. Pemilihan ini pun hanya terdapat calon tunggal, yakni Soeharto, sehingga pemilihannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kemudian pada periode berikutnya hasil Pemilu 1977 menyelenggarakan pemilihan Presiden pada tanggal 22 Maret 1978. Pelaksanaan pemilihan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan menggunakan TAP MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terpilih sebagai Presiden adalah Soeharto dengan cara pengangkatan melalui TAP MPR No. X/MPR/1978. Pada pemilihan-pemilihan Presiden berikutnya pada tahun 1983, 1988, 1993, dan 1998 juga terdapat calon tunggal, yaitu tetap Jendral Soeharto.

Inilah sketsa historis singkat tentang potret pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang sarat dengan berbagai terobosan terobosan baru untuk menjadikan Indonesia yang lebih demokratis lagi.

Usaha usaha untuk mewujudkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas, yakni pilpres yang lebih demokratis, jujur dan adil yang dapat menghasilkan pemimpin yang mau bekerja keras, dengan mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi dan golongan, tidak cukup hanya dengan peningkatan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta meningkatkan profesionalitas dan kualitas dari penyelenggara pemilu, tetapi harus juga memperbaiki sistem pemilu itu sendiri, sehingga betul-betul dapat memberikan kesempatan pada warga masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya dengan langsung umum, bebas dan rahasia, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.⁵

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat Pemilihan Umum Presiden dapat terwujud jika penyelenggaranya memiliki nilai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. karena penyelenggara pilpres yang lemah akan berpotensi menghambat terciptanya pemilihan umum pilpres yang pro akan kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar

⁵⁵ Rozali Abdullah, S.H, (*Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: penyelenggaraan pemilu*, cetakan ke-1, Jakarta: rajawali pers, 2009), hlm. 147

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Pilpres memiliki tugas menyelenggarakan Pilpres dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum Presiden, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Konsep Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan konstruksi sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk.

Dalam kamus hukum dijelaskan Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.⁶

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai reconstructive yang berarti pembinaan pembangunan baru; pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi melakukan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai kejadian tersebut⁷, Sedangkan dalam bahasa Inggris Rekonstruksi disebut sebagai reconstruction yang artinya ” the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even”.⁸

Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivme, gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan permasalahan masyarakat yang ada pada pada saat ini.

⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989), hlm.88

⁷ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hlm.144

⁸ Macquarie Library, *The Macquarie Dictionary*, (Australia,1985), hlm.1420

Rekonstruksionisme di pelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930 yang ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Diantara tokoh yang terkenal yaitu Caroline pratt, George count, dan Harold rugg.⁹

Beberapa pakar mengartikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi, B.N Marbun mengartikan secara sederhana bahwa penyusunan atau penggambaran ulang dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, menurutnya rekonstruksi itu harus mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan Realita saat ini¹¹

Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu dalam Negara dengan penduduk jutaan, para warga mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya media massa¹²

Pemahaman hakikat “demokrasi” terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi serta nilai yang terkandung di dalamnya. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau kependudukan suatu tempat dan “crates” atau “cratos” yang berarti kekuasaan

⁹ Zuhairini, *Filsafat pendidikan islam* (Jakarta : bumi aksara 2004) hlm., 29

¹⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.469.

¹¹ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmi bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya,

¹² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2011), hlm.174

atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹³ Dan secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. ¹⁴ Artinya di laksanakan sesuai dengan kehendak hati nurani rakyat sendiri tanpa ada paksaan dari arah manapun.

Dengan demikian, dapatlah di ambil sebuah kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Menurut Moh. Mahfud MD mengandung pengertian tiga hal penting: **Pertama**, pemerintah dari rakyat (*government of the poeple*); **Kedua** pemerintahan oleh rakyat (*government by poeple*); **Ketiga**, pemerintahan untuk rakyat (*government for poeple*).¹⁵ Jadi, bila ketiga hal diatas dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik dalam suatu tata pemerintahan, maka akan tercapailah suatu masyarakat yang demokratis, yang aman, tentram dan damai sesuai cita-cita rakyat bersama.

Asas-Asas Demokrasi

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

¹³ A. Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2003), hlm.162.

¹⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Negara, Demokrasi dan Civil Society* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.33.

¹⁵ Op, Cit., A. Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, hlm.163.

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Sistim Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu stuktur yang terdiri dari fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif yang saling bekerjasama, berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga Negara dan hubungannya satu sama lain¹⁶. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan ke dalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensil dan parlementer, diluar kedua sistem tersebut merupakan sistem “Campuran” atau kuasi parlementer dan kuasi presidensil, ada juga yang menyebut sistem referendum. Dimana dalam sisetem referendum badan Eksekutif merupakan bagian dari badan legislative. Dalam sistem ini badan legislative membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Control terhadap badan legislative dilakukan secara langsung melalui referendum.¹⁷

Dilihat dari sistem Pemerintahan itu sendiri, sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya

¹⁶ Op., Cit., *Menuju Sistem Pemerintahan.*, hlm 46

¹⁷ Sulardi, Dkk, *Hukum Pemerintah Daerah, Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif*, (Malang: INtelegensia Media, 2017) hlm 26

jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.¹⁸

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.¹⁹

Menurut Moh. Mahfud MD,²⁰ sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum. Sejalan dengan pandangan Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad* yakni penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsilegislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan tiga macam, yaitu:²¹

- (1) Sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*);
- (2) Sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*);
- (3) Sistem campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).

Sri Soemantri juga mengemukakan varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran.²² Deny Indrayana juga mengemukakan varian sistem pemerintahan dengan lebih variatif dari beberapa ahli diatas, yakni sistem parlementer, sistem presidensial,

¹⁸ Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: FHUI, 1980) hlm. 171.

¹⁹ *Ibid.* hlm 172.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000), hlm. 74

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007) hlm. 311

²² Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Op.Cit. Hlm. 76-80

sistem hybrid atau campuran, sistem kolejal, dan sistem monarki.²³ C.F.Strong dalam buku "modern political constitution" membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori; parliamnetary executive dan nonparliamentary executive atau the fixed executive.²⁴ Dalam penelitian ini, akan dijabarkan varian sistem pemerintahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer dan sistem pemerintahan hybrid (campuran). Secara umum, pilihan tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa ketiga sistem pemerintahan tersebut lebih banyak dipraktikkan jika dibandingkan dengan sistem kolejal, dan sistem monarki. Di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, dinilai mengandung sistem pemerintahan parlementer, sistem presidensial dan sistem campuran.

PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum adalah merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden / kepala daerah. Bahkan dinegara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).²⁵

Menurut teori demokrasi klasik pemilihan umum merupakan suatu Transmission of belt sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.²⁶

Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional)

Secara umum sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan

²³ Deny Indrayana, *Mendesain Presidensial Yang Efektif; Bukan 'Presiden Sial' Atawa 'Presiden Sialan'*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta, 13 Desember 2006. Hlm.1.

²⁴ C.F.Strong, *Modern Political Constitution: An Intoduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Form*, (London: Sidwick & Jackson Limited, 1975), hlm. 209-244.

²⁵ Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*, Disertasi, (Medan: Program Pasca Sarjana USU, 2007), hlm. 143.

²⁶ Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 121

mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga) fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas)²⁷

Apabila dikaitkan dengan dengan sistem perwakilan, pemilihan organis dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (function representation) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia. Pemilihan anggota Senat Irlandia dan juga para Lords yang akan duduk di House of Lords Inggris, didasarkan atas pandangan yang bersifat organis tersebut. Dalam sistem pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua-partai atau pun multi-partai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan sistem satu-partai menurut paham komunisme. Tetapi dalam sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri. Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Sedangkan, menurut sistem yang kedua (organik), lembaga perwakilan rakyat itu mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup itu masing-masing. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, sistem yang pertama (mekanis) menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua (organik) menghasilkan dewan korporasi (korporatif). Kedua sistem ini sering di kombinasikan dalam struktur parlemen dua-kamar (bikameral), yaitu di Negara-negara yang mengenal sistem parlemen bikameral²⁸

Selanjutnya sistem mekanis sendiri, dalam pelaksanaannya menggunakan dua cara, yaitu sistem perwakilan distrik/ mayoritas (single member constituencies) dan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 179.

²⁸ Ismail Suny, *Sistem Pemilihan Umum yang menjamin Hak-hak Demokrasi Warga Negara, dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Suny mengenai Pemilihan Umum*, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim, 1970.

sistem perwakilan berimbang (proportional representation). Gagasan pokok sistem perwakilan berimbang (proportional representation atau sering disebut multi-member constituency) ialah bahwa jumlah kursi parlemen yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat. Diperlukan suatu perimbangan, misalnya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000 000 (satu juta) orang, dan jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat ditentukan 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000. Negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar daripada distrik dalam sistem distrik), dan setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu.

Sistem Perwakilan Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua, didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan pemilihan negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang diberikan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisih kekalahannya.

Misalnya dalam distrik dengan jumlah suara 100.000, ada dua calon yakni, A dan B. calon A memperoleh 60.000 dan B 40.000, maka calon A memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah suara 40.000 dari calon B dianggap hilang. Sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan India. Ada dua karakter utama yang membedakan sistem distrik dari sistem- sistem lainnya, pertama, di dalam sistem distrik pemilihan dikaitkan langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan, yang disebut “distrik” biasanya distrik ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administratif.

Distrik pemilihan merupakan sebuah wilayah yang garisgaris perbatasannya ditarik sedemikian sehingga sesuai dengan syarat-syarat pemilihan umum, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa jumlah pemilih yang mendiami suatu kira-kira sebanding dengan jumlah di distrik- distrik lainnya.

Sistem distrik mensyaratkan adanya keadaan yang relatif saling kenal antara rakyat pemilih dengan wakil yang dipilihnya. Malah sering pula masyarakat pemilih bukan saja kenal dengan pilihannya, melainkan juga dengan keluarganya. Adanya pertalian yang akrab antara pemilih dengan orang yang dipilihnya, memudahkan rakyat untuk menyam paikan aspirasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakilnya di kemudian hari. Selain itu, dengan mengenal calon yang dipilihnya, maka massa pemilih terhindar dari praktek “membeli kucing dalam karung” sebagaimana yang sering terjadi dalam pemilihan sistem daftar. Di dalam sistem distrik kiranya sulit bagi organisasi politik untuk “mengelabui” rakyat tentang keadaan calon-calonnya. Sebab para pemilih akan memilih calon yang dirasanya baik, yaitu orang yang dikenal sepak terjangnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal reaserch*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁹

Adapun data yang digunakan dalam menyusun tulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data lainnya yang dibahas oleh penulis. Tentang penggunaan pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini karena masalah yang akan diteliti berkisar sistem pelaksanaan pemilihan presiden.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*kualitatif research*),³⁰ yakni penelitian ini diarahkan kepada ekplorasi kajian pustaka (*library research*), yakni bersifat *statement* atau pernyataan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya penelitian dengan menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori - teori hukum dan

²⁹ Ronal Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2003), hlm. 1.

³⁰ Lexi J.M, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 164.

pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a) Bahan Hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan hukum atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim,³¹ bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku-buku, Jurnal Ilmiah yang terkait dengan Judul Penelitian.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, Kamus-Kamus Hukum, Jurnal-Jurnal Hukum, dan komentar dan putusan hakim³². Menurut Gregory dalam bukunya Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa dalam penelitian hukum, dipergunakan pula sumber sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³³ sumber hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang membicarakan hukum, Kamus-Kamus Hukum, Jurnal-Jurnal Hukum yang terkait dengan judul penelitian sebagai panduan berfikir dalam menyusun penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasnyanya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.³⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.

³² Ibid., 54.

³³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet: III*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51-52.

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.392.

kepada subyek penelitian.³⁵ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.³⁶

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum Presiden, literatur-literatur, tulisan - tulisan para pakar hukum, bahan kuliah.

Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ditelaah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan:

1. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut;
2. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. Kategori-kategori dalam penelitian ini adalah aspek hukum pidana terkait dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu tentang pelanggaran larangan kampanye dalam hal menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain partai yang bersangkutan;
3. Menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan kemudian diolah;
4. Menjelaskan dan menguraikan hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan dengan permasalahan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan berupa kesimpulan dari permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Pasca Kemerdekaan Sampai Era Reformasi

³⁵Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006), hlm. 100

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231

Pemilihan yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya, pemilihan presiden akan dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilihan tersebut berjalan secara demokratis; aman, tertib dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan jika dilihat dari sisi hasilnya, pemilihan harus dapat menghasilkan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping dapat pula mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Apabila dilihat dari sisi hasilnya, adalah pilpres yang menghasilkan pimpinan negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945³⁷ “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.”

Dan untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut Indonesia sudah mengalami beberapa kali perombakan, pembaharuan tentang bagaimana sistem pemilihan kepala negara dan telah melewati fase – fase dan perubahan yang begitu signifikan. Sistem pemilihan pun terus menerus mengalami pembaharuan seiring kemantapan Indonesia menjadi Negara demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden yang tidak langsung misalnya menjadi pemilihan presiden yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tujuannya yaitu agar terwujudnya penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakilnya yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.³⁷

Melihat berbagai fenomena permasalahan sebagaimana yang penulis paparkan tersebut, berikut akan peneliti jelaskan tentang bagaimana konstruksi sistem pemilihan Presiden di Indonesia dari masa kemasa, yang peneliti bagi menjadi tiga periode, yakni periode orde lama, periode orde baru dan periode reformasi.

1. Pemilihan Presiden Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

³⁷ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Penyelenggaraan Pemilu*, cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 147

Sejarah pemilihan Presiden di Indonesia untuk pertama kalinya dalam keadaan darurat, yaitu terjadi ketika berlangsungnya sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diselenggarakan pada tahun 1945. Masalah mekanisme pemilihan Presiden dan wakil presiden sendiri memang beberapa kali disinggung, meskipun tidak secara tegas dan tuntas. Karena pada masa ini Indonesia lebih fokus kepada pembentukan Undang-Undang Dasar sebagai pegangan dan pedoman bangsa.

Ketika dilakukan sidang pemilihan Presiden masih juga terjadi perdebatan yang panjang, Soepomo sendiri misalnya, dengan tegas menolak cara-cara pemilihan Kepala Negara apabila didasarkan pada sistem demokrasi barat. Dalam Pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 di gedung Chuuuoo Sang-in Jakarta, Soepomo antara lain menyatakan sebagai berikut:³⁸

“.....Caranya mengangkat pemimpin negara itu janganlah dicampuri cara pilihan kepala Negara apabila didasarkan pada sistem demokrasi barat itu berdasar atas paham perseorangan. Untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama kepala Negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam suasana pemerintahan Negara Indonesia, harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus berhubungan dengan Badan Permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat....”

Dari apa yang disampaikan oleh Soepomo mengindikasikan bahwa demokrasi dalam sebuah Negara dianggap perlu, tetapi Indonesia tidak harus mengikuti demokrasi yang selama ini dijargonkan oleh Barat. Indonesia harus bisa membangun dan membentuk sebuah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bukan ikut-ikutan dengan dunia barat yang lebih mengedepankan kepada individualistik.

2. Pemilihan Presiden Di Indonesia Era Orde Baru

Keruntuhan orde lama mengakibatkan lahirnya orde yang lebih dikenal dengan Orde Baru, dan pergantian orde ini diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan yang menuju pada perbaikan di berbagai bidang termasuk tentang sistem pemilihan Presiden dan wakilnya, walaupun pada masa ini lebih menekankan pada bidang

³⁸ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Prapanca, Cet 1, Jakarta, 1959) hlm 119

perekonomian. harapan untuk tumbuhnya demokrasi pada awal orde baru ini memang sesuatu yang dikehendaki oleh semua pihak, karena lahirnya orde baru atas kehendak dan gerakan massa yang mengalir dari arus bawah.

Perkembangan selanjutnya, karena orde baru mengehendaki keluar dari krisis ekonomi dan politik warisan orde lama dan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat serta melaksanakan pembangunan yang sukses, maka pada orde baru mengedepankan model rekayasa politik daripada model yang partisipatif, keadaan yang demikian mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat, sehingga wajah demokrasi bukanlah demokrasi yang baik, bahkan pemerataan dan pembangunan demokrasi tidak berhasil diciptakan.

Ketidak berhasilan itu bisa dilihat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia misalnya, belum pernah ada peraturan khusus yang mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum 3 Juli 1971 mengeluarkan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan berpegang kepada ketetapan MPR inilah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan.

Di Indonesia sistem pemilihan presiden ini diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen menyatakan :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.

Dari ketentuan tersebut, maka *Pertama*, Indonesia menganut sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung, yakni Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga Negara yakni MPR. Rakyat memilih dulu wakil-wakilnya yang akan duduk di MPR, kemudian lembaga inilah yang melakukan pemilihan Presiden. *Kedua*, Pemilihan Presiden dilakukan dengan pemungutan suara, bukan dengan cara musyawarah ketika, yang dipilih sebagai Presiden adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Ketentuan inilah yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan hukum tertinggi dalam melaksanakan pemilihan Presiden sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Khususnya pada masa Presiden Soeharto berkuasa.

3. Sistem Pemilihan Presiden Pada Era Reformasi

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1999, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada era reformasi ini, regulasi tentang pemilihan Presiden didasarkan pada ketetapan MPR No XIII tahun 1998, dalam ketetapan ini, ada dua hal baru sebagai revisi atas ketetapan MPR No II/MPR 1973, sebagaimana dikemukakan oleh Saldi Isra³⁹

Pertama, pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan wakil Presiden melalui TAP MPR No XII/MPR/1998. Ketetapan ini mengakhiri perdebatan penafsiran ganda terhadap pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan ini ditafsirkan oleh rezim Soekarno dan Soeharto bahwa seorang dapat dipilih menjadi Presiden secara berulang-ulang. Bahkan Soekarno melalui TAP MPRS No III/MPRS/1963 ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Ketentuan ini justru tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang menyatakan bahwa dalam sebuah pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang ada jenjangnya.

Kedua, adanya perbaikan terhadap TAP MPR No II/MPR/1973 karena dianggap tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi. Perubahan ini dilakukan dengan pengesahan TAP MPR No VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI. Dua perbaikan yang dilakukan oleh MPR dalam tata cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 1) adanya peluang untuk mencalonkan seseorang menjadi Presiden melalui fraksi. Dalam pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa calon presiden dan wakil Presiden juga dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya tujuh puluh orang anggota MPR yang terdiri atas satu fraksi atau lebih. 2) Hilangnya ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat bekerja sama.⁴⁰

³⁹ Saldi Isra, *Perkembangan Pengisian jabatan di bawah UUD 1945*, dalam <http://www.saldiisra.web.id/> diunduh 28 April 2017

⁴⁰ Ibid., 60

REKONSTRUKSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

Merekonstruksi sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah suatu keharusan hingga saat ini, jika melihat fenomena perpolitikan Indonesia sekarang sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, namun juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketatanegaraan ini dilakukan melalui apa yang disebut dengan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Jatuhnya masa orde baru 1998 memunculkan sebuah harapan untuk menata sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan integritas, trauma masyarakat akan sistem otoriter pada masa orde baru mengawali evaluasi sistem politik yang lebih demokratis. Namun demikian, kenyataan yang sering terjadi bertolak belakang dengan harapan. Fenomena sistem perpolitikan hari ini semakin hari semakin menunjukkan pada kegalauan. Transformasi kepemimpinan di zaman reformasi sekarang masih belum menyentuh titik fundamental untuk mampu melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki kewibawaan dan nasionalisme yang kuat.

Untuk mewujudkan kewibawaan tersebut salah satunya harus ditopang oleh komitmen bersama dalam suksesi pemilihan presiden dan wakilnya, selama ini permasalahan tentang mekanisme pemilihan kepresidenan masih meninggalkan jejak negatif. Apalagi perbincangan tersebut berkecimpung pada kritik atas sebuah kebijakan.⁴¹ Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden Indonesia sudah demokratis atau tidak baik pada tataran persyaratan calon presiden, Proses Pencalonan Presiden, maupun mekanisme pemilihannya:

⁴¹ Bambang Widjojanto, *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif Indonesia* Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1997) hlm 17

Rekonstruksi Persyaratan Calon Presiden dan wakil Presiden

Dari beberapa aturan atau perundangan yang mengatur tentang syarat calon Presiden dan wakil Presiden diatas, menurut peneliti ada beberapa point yang harus di rekonstruksi, misalnya:

1. Batas Umur Maksimal Calon Presiden

Di dalam pasal Pasal 169 UU No 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa calon presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Kemudian di pasal 5 point 15 UU No 42 tahun 2008 yang berbunyi capres Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Artinya dalam aturan tersebut ada penambahan umur bagi calon presiden yang akan dicalonkan menjadi 40 tahun, sehingga membuka peluang bagi golongan tua untuk bisa mengambil peran dalam pencalonan presiden,

Menurut peneliti dalam Undang-undang ini harus dijelaskan juga batasan maksimal seorang calon untuk dapat berkompetensi di dalam pemilu, misalnya, umur 50, 55, atau 65, hal inilah yang kemudian berdampak pada tingginya usia capres-cawapres pilihan partai politik. ini penting mengingat usia seseorang akan mempengaruhi kemampuan dan produktifitas seseorang juga dalam bekerja. Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) dijelaskan bahwa usia produktif pejabat negara diatur hanya sampai 56 tahun atau dapat diperpanjang menjadi 62 tahun bagi wakil menteri dan 65 tahun, bagi peneliti PP mengenai usia pensiun tentu didasarkan pada perhitungan produktivitas kerja maksimal seseorang terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, terpilihnya capres-cawapres yang berusia tua merupakan anomali. Bagaimana seseorang akan dapat bekerja maksimal apabila usia mereka sudah berada diatas usia produktif.

2. Pendidikan Capres-Cawapres

Menurut peneliti persyaratan pendidikan ini bernuansa politis karena ada upaya partai politik untuk menetapkan persyaratan pendidikan yang terkatagori rendah, yakni pendidikan minimal setingkat SMA, SLTA hanya untuk meloloskan kandidat capres tertentu saja, Walaupun mayoritas parpol tidak menyetujui dengan persyaratan sarjana bagi capres-cawapres dengan alasan syarat akademis calon presiden tidak didasarkan pada tingkat akademis, tetapi yang terpenting adalah figur dan kemampuan memimpin.

Menurut peneliti bahwa syarat dan kualifikasi sarjana dalam Undang-Undang Pilpres harus dicantumkan untuk menunjukkan bahwa pemimpin Indonesia khususnya, untuk menjadi Camatpun disyaratkan pendidikan minimal S1, apalagi Presiden dan wakilnya adalah lulusan Perguruan Tinggi sehingga diharapkan bisa memiliki cara berfikir yang komprehensif, analitis, dan kritis dan bukan bermaksud mengecilkan seorang pemimpin yang hanya lulusan SMA, karena di waktu SMA peran guru yang lebih dominan, barulah di perguruan tinggi seorang mahasiswa dilatih untuk belajar secara mandiri dan dibekali dengan berbagai teori dan peluang supaya pikirannya menjadi kritis serta bisa menganalisis berbagai situasi dan kondisi, mengingat kompleksitas permasalahan di negeri ini sangat genting, membutuhkan pemikiran yang ekstra, kritis, analitis, misal kenaikan BBM, kenaikan PLN, korupsi merajalela dimana, dan permasalahan negara lainnya yang semakin hari semakin runyam.

Seorang presiden tidak cukup hanya bermodal disukai oleh masyarakat, tetapi juga harus memiliki standar kecerdasan, visi, dan program. Dia mengingatkan, calon presiden yang memiliki standar kualifikasi rendah, tidak akan berwibawa dimata rakyatnya.

Menurut peneliti anggapan pejabat tidak harus berpendidikan tinggi keliru. pengetahuan bisa diperoleh dengan belajar dan lewat pengalaman. Namun, pengetahuan akan yang lebih cepat dicerna jika seseorang memiliki jenjang pendidikan tinggi.

3. Rekonstruksi Proses Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Partai politik saat ini cenderung menutup akses dan partisipasi dari publik. Sebaliknya UU No 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum justru memberi cek kosong kepada partai politik untuk menentukan capresnya masing-masing, sehingga yang berlangsung kemudian adalah penetapan Capres dan mekanisme Capres secara oligarkis oleh ketua umum atau pun pimpinan parpol. Hampir tidak ada kesempatan bagi publik memilih kandidat berdasarkan kapabilitas para capres. Lebih buruk lagi seolah-olah posisi sebagai ketua umum atau pimpinan parpol merupakan tiket untuk menjadi capres. Tidak mengherankan jika kemudian muncul fenomena dimana sebagian besar parpol justru mengusung pimpinan mereka sebagai capres

ketimbang mencari tokoh-tokoh terbaik diluar parpol. Padahal belum tentu ketua parpol atau pimpinan-pimpinan Parpol tersebut memiliki kapabilitas kepemimpinan sebagai presiden,.

Kedepannya menurut penulis perlu dilembagakan pemilihan pendahuluan internal parpol bagi pasangan calon Presiden dan atau wakil Presiden. Sebagaiman tertuang dalam pasal 10 UU 42 tahun 2008 “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan potensi munculnya pasangan Presiden atau wakil Presiden yang semata-mata populer secara publik, namun belum tentu Kapable, perlu dilembagakan mekanisme pemilihan pendahuluan diwajibkan bagi setiap parpol/gabungan parpol dan diatur dalam UU Pilpres agar setiap parpol melakukan seleksi capres secara sungguh-sungguh dan beroreintasi kepada kepentingan dan masa depan bangsa Indonesia.

1. Calon Perseorangan

Peraturan perundang-undangan tentang pemilihan presiden saat ini masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan seperti UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 42 Tahun 2008 dan UU No 7 tahun 2017, salah satunya tentang tidak adanya peluang bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membuka peluang calon presiden perorangan atau independen. Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

Penolakan tersebut merujuk Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. yang berbunyi *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*

Penolakan yang dilakukan MK ini menurut peneliti harus dikaji ulang karena demi partisipasi masyarakat seluas-luasnya, semua pintu semestinya dibuka untuk semua orang. Seseorang yang berkualitas menduduki jabatan-

jabatan publik semestinya tidak terhambat karena tidak memiliki kendaraan jalur parpol. Dengan tidak hanya monopoli parpol, maka hal ini akan memicu persaingan yang sehat dan organisasi partai semakin memodernisasi dirinya. Partai yang tidak sehat akan tergerus perubahan zaman dan ditinggalkan konstituennya dengan sendirinya.

Dengan menempatkan partai politik menjadi satu-satunya jalur untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis dan merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik.

Menurut peneliti ada beberapa point yang harus rekonstruksi, diantaranya: harus ada upaya yang dilakukan dalam rangka terakomodasikannya calon Presiden dan wakil Presiden perseorangan/independen dalam pemilu yang akan datang antara lain dengan dilakukannya uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU No 7 tahun 2017 terhadap UUD 1945.

2. Presidential Threshold,

Di dalam UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 9 ketentuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden harus melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Menurut peneliti norma ini bernuansa politis karena lebih merupakan konsensus politik dari partai-partai besar untuk mengurangi atau bahkan menutup peluang bagi partai politik peserta pemilu lainnya. ketentuan tersebut memang mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Desain itu juga mengurangi kesempatan partai-partai kecil menempatkan

wakilnya di DPR. Problematika terakhir yaitu tidak adanya kesempatan atau peluang bagi kelompok masyarakat di luar partai politik untuk mengukung bakal calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan konstitutif ini dipandang mengurangi hakekat dan nilai demokrasi, oleh karena warga negara yang bukan merupakan anggota partai politik atau konstituen, tidak memiliki peluang terlibat secara lebih awal dalam mempersiapkan calon pemimpin pemerintahan. Belum lagi diperparah dengan kenyataan perpolitikan Indonesia, dimana kinerja partai politik mendapat sorotan negatif karena kurang mampu dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kehendak rakyat.

Masalah ini selalu menjadi perdebatan, apakah prosentasenya dikurangi, tetap tidak ada perubahan, atau dihilangkan sama sekali, atau justru diperbesar, jalan keluarnya tentu dengan merevisi UU 42 tahun 2008, dan UU No 7 tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Presidential Threshold yang menurut peneliti tidak relevan lagi dengan kondisi perpolitikan sekarang penetapan Presidential Threshold (PT) bisa saja merupakan akal-akalan pembuat UU yang berimplikasi pada berkurangnya kedaulatan rakyat. PT menyebabkan warga negara yang potensial terpilih dan memiliki gagasan baru tak bisa mencalonkan diri. Padahal, rakyat berhak memiliki banyak paslon presiden-wakil presiden yang dapat mengakomodasi aspirasi. di beberapa negara dengan sistem presidensial dan pemilu serentak, tak ada aturan PT.

Menurut peneliti ketentuan *Presidential Threshold*, yang ada di UU Pilpres perlu ditinjau ulang dikarenakan beberapa faktor:

1. Ketentuan ini tidak memenuhi asas keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini juga dianggap diskriminatif terhadap partai baru calon peserta pemilu presiden 2019.
2. Merugikan partai politik baru yang tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden lantaran keterbatasan suara yg diraupnya
3. Tidak relevan untuk dikenakan pada pemilihan presiden yang dilakukan serentak dengan pemilu legislatif.
4. AS yang juga menggunakan sistem presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Negara Amerika latin yang juga menggunakan sistem

presidential dengan sistem kepartaian majemuk seperti Indonesia juga tidak mengenal Presidential Threshold

Solusinya adalah dengan memperketat persyaratan verifikasi calon presiden dan wakil presiden. Jika persyaratan verifikasi diperketat, maka jumlah pasangan calon pun tidak akan melebihi persyaratan. Tidak ada basis angka hasil pemilu legislatif yang bisa dijadikan dasar untuk prasyarat pencalonan presiden, karena pemilu akan dilaksanakan secara serentak. menggunakan angka PT pada Pileg 2014, dianggap tak logis karena Pemilu 2019 bukan bagian dari Pileg 2014.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden. Secara politik, ketentuan ambang batas pencalonan presiden juga akan dianggap membatasi kesempatan partai atau warga negara lain maju menjadi pasangan calon presiden

a. Rekonstruksi Mekanisme Pemilihan Presiden / Wakil Presiden di Indonesia

Konstruksi sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang peneliti jelaskan tersebut diatas, adalah sebagai bentuk dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, Berganti pemimpin, berganti juga corak sistem pemerintahannya. maka tentu sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden tersebut harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, masyarakat Indonesia hari ini sudah sangat trauma dengan sistem yang kaku, sistem yang memonopoli dan menghegemoni hak-hak rakyat, sebuah sistem yang sama sekali tidak memberikan pembelaan dan kesejahteraan pada rakyat, sistem yang lebih mementingkan golongan dan ideologi tertentu, maka dalam hal ini menurut peneliti harus ada semacam gebrakan atau reformasi baru utamanya terkait dengan mekanisme pemilihan Presiden yang lebih ideal dan demokratis.

Realitasnya demokrasi yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kultur dan budaya Indonesia yang bukan mengadopsi demokrasi Barat, Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengedepankan falsafah Negara yakni Pancasila, kebhinekaan

dan Semangat Nasionalisme, tentunya untuk membangun dan mewujudkannya sebagaimana yang di jelaskan Henry B Majo tersebut tentunya hakekat demokrasi dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden tidak boleh hanya dijadikan retorika saja. Demokrasi juga bukan menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan pemimpin, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan. Yang perlu di perhatikan lagi perihal mekanisme pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia adalah:

1. Penguatan (Empowering) Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaran bawahannya

Agar pengawasan seluruh pelaksanaan tahapan pemilu dapat berlangsung secara efektif, sehingga berbagai pelanggaran pemilu, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana dapat diselesaikan sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pilpres.

Penegakan hukum yang konsisten, terutama dari aparat penegak hukum manakala memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa kepemiluan. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi “shock terapi” bagi khalayak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di waktu yang akan datang.

Kedepannya dengan adanya gebrakan baru yakni melaksanakan pemilu secara serentak. Harapannya penataan politik akan lebih efisien dan efektif. Oleh sebab itu, akan menjadi produktif jika wacana tentang perbaikan sistem pemilu diperluas dengan membuka kemungkinan adanya modifikasi sistem pemilu menjadi lebih sederhana.

2. Hak Pilih (Jual beli suara, Manipulasi pemilih, manipulasi demografi, penghilangan hak pilih, memecah dukungan oposisi)

Indikator dari pemilu yang demokratis diantaranya tersedianya ruang dan kebebasan bagi rakyat (pemilih) untuk ikut mempersiapkan dan menentukan penyelenggara negara melalui kegiatan pemilihan umum. Secara normatif, baik pada tataran konstitusi (UUD 1945) maupun perundang-undangan lainnya, telah diakui adanya hak rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan yang ada.

Namun dalam praktik, keterlibatan pemilih belum lengkap karena masih adanya sejumlah warga negara yang berhak namun tidak terdaftar sebagai pemilih, sehingga pada akhirnya tidak terlibat dalam pemilihan umum. Hal ini terjadi karena minimnya dukungan administrasi dari pemerintah untuk menyiapkan data base yang digunakan oleh penyelenggara (KPU). Data berikut menunjukkan jumlah pemilih terdaftar di DPT, pemilih yang gunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih, serta pemilih yang tidak terdaftar melalui DPT.

Selain problematika administrasi, keterlibatan pemilih masih bersifat semu karena penentuan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik secara elitis, walaupun dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan” Meski diperintahkan agar dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun dengan adanya frase “Sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan” menjadi alasan atau pintu masuk bagi partai politik untuk merumuskan aturan internal yang mengurangi hakekat dan makna frase “secara demokratis dan terbuka”

3. Budaya Kecurangan

Sepertinya perilaku curang atau tindakan yang tidak sejalan dengan aturan pemilihan presiden dan wakil presiden dan masih saja berlangsung hingga pemilihan terakhir yakni ketika Joko Widodo dan Yusuf Kalla, kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing kubu tidak terelakan, kasus klasik pendahuluan start kampanye misalnya. Tindakan inilah yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan

Modusnya pun bermacam-macam, seperti pemasangan baliho, spanduk, pembagian selebaran. Motif kunjungan kerja pun sering dilakukan, khususnya bagi calon incumbent. Intensitas kunjungan kerja ini akan makin tinggi disaat mendekati pemilu. Media lokal bahkan sering digunakan sebagai alat kampanye dini. Para calon menyembunyikan visi-misi kampanyenya di balik berita-berita media.

Menyikapi budaya kecurangan ini menurut peneliti perlu adanya rumusan kode etik kampanye yang tegas agar sosialisasi politik tidak menjurus pada kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar pesan moral kepada para pemilih bahwa perbedaan dukung politik tidak harus disertai dengan permusuhan, kenyatannya seiring bergulirnya perodesasi dalam pemilihan presiden, permasalahan pun semakin kompleks dan rumit baik ketika awal kemerdekaan sampai pada era reformasi sekarang. Sehingga kompleksitas masalah dalam sistem pemilihan Presiden tersebut pada muaranya akan menuju kepada pemilihan yang lebih demokratis. Tidak ada lagi saling menghujat, menghina, dan memfitnah justru juga dilakukan oleh mereka yang mendukung di luar tim kampanye. Tentu sikap-sikap tersebut justru membuat proses demokrasi ini berjalan mundur dan ternoda.

Persoalan pelanggaran dalam kampanye sebisa mungkin menjadi perhatian dari Bawaslu yang memiliki wewenang untuk mengawasi atribut kampanye oleh partai politik tertentu. Dalam menghadapi pesta demokrasi seperti Pilpres, Bawaslu perlu memberikan peringatan keras kepada tim kampanye masing-masing calon yang melanggar tata cara kampanye sesuai dengan Undang-Undang sehingga tindakan pelanggaran tidak merajalela pada saat Pemilu berlangsung. Pengawasan ketat dimaksudkan untuk menciptakan iklim demokrasi dalam Pemilu yang sesuai dengan harapan rakyat dan memberikan angin segar bagi terbangunnya kepemimpinan ideal di masa depan.

KESIMPULAN

Konstruksi sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai bentuk dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, Berganti pemimpin, berganti juga corak sistem pemerintahannya. maka tentu sistem pemilihan Presiden dan wakil

Presiden tersebut harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, Bangsa Indonesia sudah berebarapa kali merombak sistem pemerintahan mulai dari sistem presidensial maupun parlementer, begitupun mekanisme pemilihan presiden dan wakil Presiden tidak lepas dari perombakan-perombakan dimulai dari Indonesia Merdeka, Orde Lama, Orde Baru ataupun Era reformasi sekarang ini,

Penyempurnaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tidak hanya terkait penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legeslatif dan pemilu presiden, melainkan juga penataan kembali format pemilihan presiden itu sendiri. Seperti menjanjikan munculnya kandidat presiden yang memiliki kompetensi dan kapabilitas, tetapi juga cenderung mendistorsi obsesi penguatan presidensialisme sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen UUD 1945.

Diantara faktor penting dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang ideal dan demokratis adalah dengan memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adanya hak pilih umum (aktif dan pasif), Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda baik dari parpol maupun calon presiden dari perseorangan, sayangnya Konstitusi hari ini belum menghendaki akan adanya calon dari perorangan atau independen, MK dengan tegas menolak pasangan calon yang tidak berasal dari parpol ataupun parpol politik dengan merujuk kepada UUD 1945 pasal 6A “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, Faktor lain adalah adanya kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, Persamaan hak kampanye, Kebebasan dalam memberikan suara Pemilih, Kejujuran dalam penghitungan suara kejujuran dan keterbukaan Penyelenggaraan secara periodik

Model pemilihan presiden yang dijalankan di Indonesia saat ini diharapkan dapat mampu menghasilkan sebuah pemerintahan yang memiliki legitimasi besar untuk pemerintah, sehingga mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Tidak hanya berputar kepada wilayah perebutan kekuasaan tetapi menihilkan kedaulatan rakyat, harapannya semoga pemilihan Presiden dan wakil Presiden serentak yang diserahkan dengan lembaga Legislatif pada 2019 nanti akan sangat berimplikasi positif terhadap sistem ketatanegaraan yang mengedepankan prinsip keadilan dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: penyelenggaraan pemilu*, cetakan ke-1, Jakarta: rajawali pers, 2009.
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Abdullah idi, Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan*. Jakarta; gaya media pratama, 2002.
- Aidul Fitriciada Azhari, *Menentukan Demokrasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)
- Alrasyid, Harun. Tradisi Calon Tunggal dalam Pemilihan Presiden”, Suara Pembaharuan, 2 Maret 1993
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Ronal Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2003),
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- C.F.Strong, *Modern Political Constitution: An Intoduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Effendy, Form*, London: Sidwick & Jackson Limited, 1975.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Hasan. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka 2007.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2011.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- J.M, Lexi, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

- Kaelan. Pendidikan *Kewarganegaraan*. Jakarta:Paradigma, 2012.
- Kusnardi, Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: FHUI, 1980.
- L. Witman Shepherd dan John J. Wuest, *Comperative Government*, Newyersy: Littleffield, Adams & Co, 1963.
- Mulyosudarmo, Suwoto, Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nakwasara)*, Jakarta: Pt. Garamedia, 1997.
- Mahfud Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.\
- Mudhofir, Ali. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Mahhfud MD, Moh, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000.
- Mahfud MD. Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokras*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Noor Syam, Muhamma, *Filsafat Pendidikan Dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya; Usaha Nasional, 1986.
- P. Chaplin, James, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Qardhawi, Yusuf, *Problematika Relasi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikr 2014.
- Subagyo, Firman; *Menata Partai Politik, Dalam Arus Demokratisasi Di Indonesia*; RMBOOKS; Jakarta; 2009.
- Sirajuddin, dkk *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Stara Press, 2015
- Soehino, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta; Liberty, 1993.
- Sulistyowati dan Sidharta *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2009.
- Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan PResidensiil Murni (Malang: Setara Press, 2012)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamud' *litian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet: III*. Jakarta: UI Press, 1986.

Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2003.

Ulinnuha. Roma, *KEWARGANEGARAAN (Kompilasi Referensi)*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Zuhairini, *Filsafat pendidikan islam*, Jakarta : Bumi Aksara 2004.

Uchjana, Onong *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

